

ANALISIS PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *RISK DISCLOSURE*

**(Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

HERMAS ADITYA
NIM. 12030111130131

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Hermas Aditya

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130131

Fakultas/ Jurusan : Fakultas Ekonomika dan Bisnis/ S-1 Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *RISK DISCLOSURE***

Dosen Pembimbing : Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, September 2015

Dosen Pembimbing

Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt
NIP. 19760522 200312 1 001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Hermas Aditya

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130131

Fakultas/ Jurusan : Fakultas Ekonomika dan Bisnis/ S-1 Akuntansi

Judul Skripsi : ***ANALISIS PENGARUH GOOD CORPORATE
GOVERNANCE TERHADAP RISK
DISCLOSURE***

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal

Tim Penguji:

1. Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt. (.....)
2. Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Akt (.....)
3. Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Hermas Aditya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**ANALISIS PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *RISK DISCLOSURE*** “ adalah hasil tulisan saya sendiri. Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat atau sebagian tulisan yang saya ambil dengan menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat maupun pemikiran yang berasal dari penulis lain, yang seolah-olah menjadi sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin,tiru atau tulisan yang saya ambil dari penulisan orang lain tanpa memberi pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, September 2015

Yang membuat pernyataan

Hermas Aditya
NIM. 12030111130131

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri”

(Al-Ankabut ayat 6)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(Al Insyiroh ayat 5)

“We can because we think we can”

“Siapkan hari ini untuk esok selanjutnya”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Suhardiyanto dan Kristini Rohmawati, saudara kandung saya Hanif Yushika Permana dan Hanan Rahma Ardiana, Risna Erwi Octavia, dan semua teman seperjuangan yang telah memberikan semangat, dukungan, doa, dan fasilitasnya.

Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of board size, the proportion of independent board, managerial ownership, and institutional ownership. While risk disclosure as the dependent variable was measured using RDI (Risk Disclosure Index). There are 46 items on RDI. RDI incorporate components that are relevant to the banking companies, which came from Bank Indonesia Circular Letter in 2012. The elements contained in Circular Letter of Bank Indonesia has become material to obtain a list of disclosures of each company.

This study uses secondary data with entire population manufacture companies listed in the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2012 up to 2014. Sample contains from 28 companies. The method used to determine the sample using purposive sampling. The analytical method used is multiple regression as the analysis technique using by SPSS.

The results of hypothesis testing showed that board size and institutional ownership positively affects risk disclosure. While the proportion of independent board and managerial ownership did not significantly affect risk disclosure.

Keywords: *board size, the proportion of independent board, managerial ownership, institutional ownership, risk disclosure, RDI*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris, komposisi komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap *risk disclosure*. *Risk disclosure* merupakan variabel dependen yang diukur dengan menggunakan RDI (Risk Disclosure Index). RDI terdiri dari 46 item. RDI memasukkan komponen-komponen yang relevan dengan perusahaan perbankan, yang berasal dari Surat Edaran Bank Indonesia tahun 2012. Elemen-elemen yang terdapat pada Surat Edaran Bank Indonesia tersebut menjadi bahan untuk memperoleh daftar pengungkapan setiap perusahaannya.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012 sampai dengan 2014. Sampel penelitian terdiri dari 28 perusahaan. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel adalah penelitian ini dengan metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan teknik SPSS.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap risk disclosure. Sedangkan proporsi komisaris independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan risiko.

Kata kunci: ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, *risk disclosure*, RDI

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Risk Disclosure*”.

Selama penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak hambatan oleh namun berkat bimbingan, arahan, dorongan semangat, dan bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Suharnomo, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
3. Prof. Dr. Mohammad Syafruddin, M.Si., Akt. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
4. Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang khususnya Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Prof.H. Imam Ghozali Mcom., Akt., Ph.D. selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
7. Segenap dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah membantu dalam penyusunan skripsi dengan memberikan masukan dan

kritikan yang membangun. Semoga Allah membalas semua kebaikan bapak dan ibu dosen

8. Seluruh staf prodi S-1 Akuntansi atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan dalam bidang akademik dan pelayanan mahasiswa.
9. Kedua orangtua saya, Suhardiyanto dan Kristini Rohmawati serta kedua kakak saya Hanif Yushika Permana dan Hanan Rahma Ardiana yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan fasilitas serta mendoakan saya dalam pembuatan skripsi ini.
10. Segenap keluarga besar Mbah Darmowasito dan Mbah Harjoyuwono yang selalu memberikan dorongan serta doa dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Risna Erwi Octavia beserta keluarga yang sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri yang selalu memberikan saya motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh teman bimbingan saya yaitu Bani, Hanif, Faezal, Charles, Philips, Randy, Hendra, Raymond, dan Sthepanus yang telah banyak bertukar pikiran dalam pembuatan skripsi ini.
13. Teman-teman SMAN 7 Yogyakarta yaitu Amal, Fauzi, Imbang, Irma, Nidya, Nike, Elsi, Avin, Tiara, Ririn, dan yang lainnya.
14. Pasukan GEMBEL (Akmal, Alex, Axel, Alif, Alvine, Bahrul, Bani, Ciwul, Codot, Danand, Despa, Bes, Faiz, Fajar, Fika, Galuh, Habib, Sulam, Niko, Ical, Iis, Webe, Jollifi, Kezia, Gati, Muadz, Nanang, Oo, Pepi, Pitri, Rainer, Reza, Risha, Roy, Rusdan, Adit, Majid, Anice, Kawin, Wempy, dan lain lainnya) yang selalu menemani hari hari perkuliahan dan Jalan Jalan yang nggak pernah berhenti. Terima kasih atas waktu dan pertemanannya, berkat kalian semua dunia perkuliahan ini menjadi berwarna.
15. Kontrakan Sapari (Agan, Alex, Bani, dan Nanang) dan Bapak & Ibu Sapari yang sudah jadi tempat singgah, bertukar pikiran, saling mendoakan dan cerita si penulis selama kuliah. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya.
16. Penghuni Kost Eksklusif NTT beserta Pak Rasyad & keluarga selaku pemilik kost yang sudah menjadi tempat berlindung setiap hari, terima kasih atas

kekeluargaan selama ini, semoga di suatu saat nanti kita semua bisa berkumpul lagi.

17. Teman-teman Akuntansi Undip 2011 atas kekompakan yang udah berjalan selama masa perkuliahan.
18. Keluarga KKN Undip Tim 1 Desa Sidigede, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara (Irfan, Naufal, Reza, Mbak Putri, Puput, Sella) serta Bapak Abdul Hakim selaku Petinggi Sidigede dan pemilik posko yang sudah menjadi keluarga selama sebulan penuh. Terima kasih atas kisah cerita selama KKN, semoga kekeluargaan ini terus berjalan selama lamanya.
19. Semua Pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga penulis sangat berharap atas kritik dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, September 2015

Penulis

Hermas Aditya
NIM. 12030111130131

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.4.1 Manfaat Teoritis	12
1.4.2 Manfaat Praktis	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II TELAAH PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Teori Agensi	14
2.1.2 Risiko	17
2.1.2.1 Pengertian Risiko	17

2.1.2.2 Manajemen Risiko	18
2.1.3 Pengungkapan Risiko	20
2.1.4 Ukuran Dewan Komisaris	22
2.1.5 Komisaris Independen	23
2.1.6 Kepemilikan Manajerial	24
2.1.7 Kepemilikan Institusional	25
2.2 Penelitian Terdahulu	26
2.3 Kerangka Pemikiran	29
2.4 Pengembangan Hipotesis	30
2.4.1 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap <i>Risk Disclosure</i>	30
2.4.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap <i>Risk Disclosure</i>	31
2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap <i>Risk Disclosure</i>	33
2.4.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Risk Disclosure</i>	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	36
3.1.1 Variabel Terikat/ Dependen	36
3.1.1.1 Pengungkapan Risiko	36
3.1.2 Variabel Bebas/ Independen	38
3.1.2.1 Dewan Komisaris	38
3.1.2.2 Komisaris Independen	38
3.1.2.3 Kepemilikan Manajerial	39
3.1.2.4 Kepemilikan Institusional	39
3.2 Populasi dan Sampel	40
3.3 Jenis dan Sumber Data	40
3.4 Metode Pengumpulan Data	41
3.5 Metode Analisis Data	41
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	41

3.5.2 Uji Asumsi Klasik	42
3.5.2.1 Uji Normalitas	42
3.5.2.2 Uji Multikolinearitas	42
3.5.2.3 Uji Heterokedastisitas	43
3.5.2.4 Uji Autokorelasi	43
3.5.3 Model Regresi	44
3.5.4 Uji Hipotesis	45
3.5.4.1 Koefisien Determinasi	45
3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan	46
3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	47
4.2 Analisa Data	48
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	48
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	51
4.2.2.1 Uji Normalitas	51
4.2.2.2 Uji Multikolinearitas	54
4.2.2.3 Uji Heterokedastisitas	55
4.2.2.4 Uji Autokorelasi	56
4.2.3 Model Regresi	57
4.2.4 Uji Hipotesis	58
4.2.4.1 Uji Signifikansi Simultan	58
4.2.4.2 Koefisien Determinasi	59
4.2.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual	59
4.2.4.3.1 Hipotesis 1	60
4.2.4.3.2 Hipotesis 2	60
4.2.4.3.3 Hipotesis 3	61
4.2.4.3.4 Hipotesis 4	61
4.3 Interpretasi Hasil	62
4.3.1 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap <i>Risk Disclosure</i>	62

4.3.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap <i>Risk Disclosure</i>	63
4.3.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap <i>Risk Disclosure</i>	64
4.3.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Risk Disclosure</i>	65
BAB V PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Keterbatasan	67
5.3 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Uji Autokorelasi <i>Durbin Watson</i>	44
Tabel 4.1 Sampel Penelitian	47
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	48
Tabel 4.3 Uji Normalitas Multivariate	53
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas	54
Tabel 4.5 Uji Heterokedastisitas	56
Tabel 4.6 Uji Autokorelasi <i>Durbin Watson</i>	57
Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Regresi	57
Tabel 4.8 Uji Statistik F	58
Tabel 4.9 Koefisien Determinasi	59
Tabel 4.10 Uji Statistik T	60
Tabel 4.11 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	30
Gambar 4.1 Uji Normalitas Multivariate	52
Gambar 4.2 Uji Heterokedastisitas	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam suatu proses untuk mencapai tujuan pasti akan ditemui suatu hal yang disebut risiko. Termasuk juga dalam kegiatan bisnis, risiko akan ditemui dalam prosesnya untuk mencapai tujuan bisnis tersebut. Risiko muncul cenderung bersifat tidak pasti, namun ketidakpastian tersebut akan berdampak terhadap masa depan dalam proses pencapaian tujuan. Pada awalnya risiko dipandang negatif, sedangkan sekarang risiko dipandang baik secara positif maupun negatif dalam menanggapi sejumlah peristiwa (Linsey and Shirves, 2006). Karena terdapat berbagai persepsi mengenai risiko, maka pemegang saham suatu perusahaan memerlukan informasi lanjut mengenai *risk disclosure* atau pengungkapan risiko untuk membuat keputusan dalam melakukan kegiatan berbisnis serta berinvestasi pada perusahaan tersebut.

Hal tersebut dilakukan juga dalam rangka untuk menghindari risiko. Cara yang dapat dilakukan untuk menghindari risiko salah satunya dapat dilakukan dengan cara mengelola risiko itu contohnya melalui manajemen risiko. manajemen risiko didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut (Smith, 1990). Oleh karena itu perlu dilakukan pengungkapan risiko dalam mengelola risiko-risiko yang ada.

Pengungkapan risiko pada laporan keuangan dianggap sebagai langkah yang sangat penting. Menyusul terjadinya penyimpangan akuntansi yang besar pada beberapa perusahaan contohnya seperti Enron, Parmalat, Worldcom, dan Xerox. Untuk membantu mengatasi ketidakpercayaan publik, komunikasi yang lebih baik tersebut diperlukan dan merupakan regulator yang mulai bereaksi (Probohudono *et al.*, 2013). Komunikasi ini dapat berupa pengungkapan risiko. Telah banyak peraturan mengenai pengungkapan, diantaranya adalah *International Accounting Standards Board* (IASB, 2008) di bawah *International Accounting Standard* (IAS) No.1: Penyajian Laporan Keuangan dan IAS 32: Instrumen Keuangan: Penyajian [1] mengharuskan perusahaan untuk memberikan informasi tentang ketidakpastian utama yang dihadapi dan pengungkapan informasi untuk spesifik tertentu mengenai risiko. Selanjutnya, *Financial Accounting Standard Board* (FASB, 1998), di bawah SFAC (*Statement of Financial Accounting Concepts*) No 133 menetapkan pengungkapan wajib risiko pasar yang timbul dari penggunaan aset keuangan.

Peraturan mengenai pengungkapan risiko di Indonesia diatur dalam BAPEPAM dan LK Nomor:Kep-134/BL/2006 tentang: kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten dan perusahaan publik. Informasi mengenai sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan dapat berupa pengungkapan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif.

Pengungkapan risiko dalam laporan keuangan terdiri dari pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang memiliki kandungan

informasi berupa hal-hal yang wajib sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan dengan tambahan informasi di dalamnya selain informasi yang wajib dicantumkan sehingga dapat digunakan oleh manajemen untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan tahunan dalam mengambil keputusan. Pengungkapan sukarela dapat mengubah harapan pemangku kepentingan tentang nilai perusahaan (Einhorn, 2007).

Menurut Cabedo dan Tirado (2004) dalam Probohudono *et al.*, (2013) tingkat pengungkapan risiko saat laporan keuangan dikeluarkan oleh perusahaan dapat dibidang tidak cukup. Perusahaan hanya mengeluarkan pengungkapan risiko wajib saja dan hanya sedikit yang mengeluarkan pengungkapan risiko sukarela. Hal tersebut tentunya akan membatasi pengguna laporan keuangan dari pihak luar yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan dan juga penilaian prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan.

Menurut Mirfazli (2008) dalam Probohudono *et al.*, (2013) Sebuah perusahaan harus bertanggung jawab tidak hanya atas akuntabilitas kinerja keuangan mereka, tetapi juga kinerja sosial perusahaan tersebut. Mengomunikasikan risiko yang ada dalam sebuah perusahaan dapat meningkatkan pemahaman mengenai profil tanggung jawab sosial sebuah perusahaan. Oleh karena itu pihak yang berkepentingan menggunakan informasi perusahaan tidak kesulitan melakukan kegiatannya.

Dalam sekitar satu dekade terakhir mulai terjadi perubahan dalam bidang sosial politik dan ekonomi baik di Eropa maupun di Asia. Perubahan era

globalisasi terhadap ekonomi global yang terjadi di berbagai negara berdampak juga pada Negara Indonesia. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus lebih memahami visi, misi, dan tata kelola perusahaannya masing-masing baik pada perusahaan swasta maupun pemerintah demi keberlangsungan usaha. Dengan memahami visi, misi, dan tata kelola perusahaan maka akan dapat tercipta kegiatan perusahaan yang lebih terprogram. Kegiatan perusahaan yang terprogram dapat berjalan baik jika terdapat tata kelola perusahaan yang baik atau perusahaan tersebut menjalankan konsep dasar *Good Corporate Governance* (GCG) dalam proses manajerial perusahaan.

Prinsip-prinsip *Corporate Governance* telah dijadikan acuan oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut dijadikan dasar dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan. Adapun prinsip-prinsip utama yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* meliputi: transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Sedangkan menurut (OECD), prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dikelompokkan dalam lima hal yaitu: Perlindungan atas hak-hak pemegang saham, perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham, peranan stakeholders dalam *Corporate Governance*, keterbukaan dan transparansi, dan akuntabilitas direksi dan komisaris.

Fenomena yang terjadi di Indonesia, krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 telah berkembang menjadi krisis multi dimensi termasuk perekonomian sehingga menyebabkan banyak perusahaan menjadi bangkrut akibat lemahnya pemahaman mengenai *Good Corporate Governance*.

Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain minimnya keterbukaan perusahaan berupa pelaporan kinerja keuangan, kewajiban kredit dan pengelolaan perusahaan terutama bagi perusahaan yang belum *go public*, kurangnya pemberdayaan komisaris sebagai organ pengawasan terhadap aktivitas manajemen dan ketidakmampuan akuntan dan auditor memberi kontribusi atas sistem pengawasan keuangan perusahaan. Lemahnya implementasi *Good Corporate Governance* akan menyebabkan perusahaan tidak dapat mencapai tujuannya berupa profit yang maksimal, tidak mampu mengembangkan perusahaan dalam persaingan bisnis serta tidak dapat memenuhi berbagai kepentingan pemegang saham.

Pengungkapan risiko secara sukarela berguna untuk mengurangi adanya asimetri informasi antara pemilik perusahaan dengan manajemen yang di dalamnya meliputi Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan juga struktur kepemilikan yang meliputi di antaranya kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional yang berperan untuk mewujudkan *Good Corporate Governance*, yang dapat mengontrol perusahaan sehingga dapat menurunkan konflik keagenan (*agency conflict*) antara pemilik dan manajer. Laporan keuangan dan pengungkapannya penting karena dapat digunakan oleh manajemen sebagai sarana untuk mengkomunikasikan tata kelola dan kinerja perusahaan kepada stakeholder atau pemegang saham (Healy dan Palepu, 2001).

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2011), dewan komisaris memegang peranan yang penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *Corporate Governance*. Menurut Dalton *et al.*, (1999) dewan komisaris dengan ukuran yang optimum lebih efektif daripada dewan komisaris

dengan ukuran kecil. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abeysekera (2008) jumlah dewan komisaris yang dinilai efektif berada pada rentang lebih dari lima orang dan kurang dari 14 orang.

Menurut Akra *et al.*, (2010) dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib. Hal tersebut menyebabkan aktivitas pengendalian dan pengawasan terhadap manajemen akan lebih baik (Andres, *et al.*, 2005). Dengan demikian diharapkan semakin bertambahnya ukuran dewan komisaris atau semakin banyaknya jumlah anggota dewan komisaris akan dapat meningkatkan *operational risk disclosure*.

Menurut Wardhana (2013) dalam pengungkapan risiko, perusahaan harus mencantumkan proporsi komisaris independen. Karena perusahaan dengan tingkat proporsi komisaris independen yang tinggi cenderung akan dituntut untuk memberikan informasi lebih banyak demi menyeimbangkan tingkat risiko reputasi pribadi mereka.

Perusahaan dengan persentase komisaris independen yang semakin tinggi maka lebih mungkin untuk mengungkapkan secara luas serta proses manajemen informasi (Baek *et al.*, 2009). Dampaknya adalah dapat mengurangi biaya agensi. Penelitian mengenai komisaris independen telah beberapa kali dilakukan yaitu oleh Abraham dan Cox (2007), Baek *et al.*, (2009), dan Probohudono *et al.*, (2013) yang menghasilkan penelitian bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara komisaris independen terhadap pengungkapan.

Kepemilikan manajerial dinilai berpotensi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan. Seperti yang telah diteliti oleh Eng dan Mak

(2003) dalam Probohudono *et al.*, (2013) dengan hasil adalah kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan.

Pada penelitian lainnya terdapat juga hasil penelitian yang menyatakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan, seperti penelitian yang dilakukan Probohudono *et al.*, (2013) yang menghasilkan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap pengungkapan.

Penelitian mengenai kepemilikan institusional yang dilakukan oleh Mangena dan Pike (2005) dan juga oleh Rouf dan Harun (2011) menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusi terhadap pengungkapan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Probohudono *et al.*, 2013 yang berfokus pada pengungkapan risiko saat terjadi krisis finansial global pada perusahaan manufaktur. Penelitian ini menguji kembali pengaruh kepemilikan manajerial dan komisaris independen pada pengungkapan risiko. Variabel negara tidak dapat dicantumkan kembali karena penelitian ini hanya dilakukan di Indonesia dan juga pada penelitian ini menghilangkan variabel ukuran perusahaan. Karena pada intinya penelitian ini memfokuskan pada *Good Corporate Governance*, sehingga yang dijadikan variabel hanya yang berkaitan dengan GCG.

Pada penelitian sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan variabel *risk disclosure* maupun *Good Corporate Governance*. Menurut Linsley dan Shirves (2006), *risk disclosure* dapat juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan berhubungan secara signifikan dengan luas

pengungkapan risiko. Menurut Abraham dan Cox (2007), *risk disclosure* tidak dipengaruhi oleh jenis industri, profitabilitas, dan kepemilikan saham publik. Namun kepemilikan institusi yang bersifat jangka pendek, ukuran dewan komisaris, dan jumlah komisaris independen berpengaruh terhadap *risk disclosure*.

Menurut Suhardjanto dan Dewi (2011) menyebutkan ukuran dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap *risk disclosure*. Namun untuk komposisi komisaris independen, komposisi komite audit independen, dan jumlah rapat komite audit independen tidak berpengaruh terhadap *risk disclosure*. Penelitian tersebut menyebutkan rendahnya tingkat pengungkapan risiko menunjukkan kurangnya penerapan tata kelola perusahaan secara baik.

Probohudono *et al.*, (2013) menyebutkan negara, komisaris independen, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *risk disclosure*. Namun untuk kepemilikan manajerial tidak memengaruhi *risk disclosure*. Penelitian yang lebih baru lagi menurut Indriyani (2014) menyebutkan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusi domestik maupun asing, kepemilikan publik tidak memiliki pengaruh terhadap *risk disclosure*. Sedangkan komisaris independen dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *risk disclosure*.

Dari hasil penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada penelitian yang berhubungan dengan *risk disclosure* maupun *Good Corporate Governance* dalam hal ini ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan

institusional masih terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor seperti terdapat perbedaan sampel, metode yang digunakan dalam pengukuran setiap variabel, latar tempat, waktu penelitian, maupun situasi atau kondisi lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa perlunya pengkajian ulang pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *risk disclosure*.

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada perusahaan yang bergerak pada sektor perbankan, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014. Dipilih perusahaan perbankan daripada manufaktur karena peraturan pengungkapan risiko pada perusahaan manufaktur tidak secara detail dijelaskan seperti pada peraturan pengungkapan risiko pada perusahaan perbankan. Seperti pada peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum. Sehingga pengungkapan risiko di perusahaan perbankan dianggap lebih baik daripada di perusahaan manufaktur. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan ingin lebih mengetahui faktor-faktor yang cenderung dapat memengaruhi pengungkapan risiko di perusahaan perbankan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Risk Disclosure*** (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2014)”.

1.2 Rumusan Masalah

Pada zaman sekarang, pengungkapan risiko pada laporan keuangan dianggap sebagai langkah yang sangat penting. Menyusul terjadinya

penyimpangan akuntansi yang besar pada perusahaan seperti Enron, Parmalat, Worldcom, dan Xerox. Untuk membantu mengatasi ketidakpercayaan publik, komunikasi yang lebih baik tersebut diperlukan dan merupakan regulator yang mulai bereaksi (Probohudono *et al.*, 2013).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abeysekera (2008) jumlah dewan komisaris yang dinilai efektif berada pada rentang lebih dari lima orang dan kurang dari 14 orang. Berdasarkan penelitian Akra *et al.*, (2010) board size berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib. Hal tersebut menyebabkan aktivitas pengendalian dan pengawasan terhadap manajemen akan lebih baik (Andres, *et al.*, 2005). Dengan demikian diharapkan semakin bertambahnya ukuran dewan komisaris atau semakin banyaknya jumlah anggota dewan komisaris akan dapat meningkatkan *operational risk disclosure*.

Penelitian mengenai komisaris independen telah banyak dilakukan yaitu oleh Abraham dan Cox (2007), Baek *et al.*, (2009), dan Probohudono *et al.*, (2013) yang menghasilkan penelitian bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara komisaris independen terhadap pengungkapan.

Kepemilikan manajerial dinilai berpotensi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan. Seperti yang telah diteliti oleh Eng dan Mak (2003) dalam Probohudono *et al.*, (2013), Rouf dan Harun (2011) yang hasilnya adalah berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan. Namun hasil penelitian yang menyatakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan juga ada, seperti penelitian yang dilakukan Probohudono *et al.*, (2013) dan Juhmani (2013) yang menghasilkan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap

pengungkapan. Penelitian lainnya mengenai kepemilikan institusional yang dilakukan oleh Mangena dan Pike (2005) dan juga oleh Rouf dan Harun (2011) menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusi terhadap pengungkapan.

Karena banyaknya perbedaan hasil pada penelitian di atas maka perlu dilakukan pengkajian ulang penelitian. Dalam penelitian ini akan menganalisis pengaruh dari ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *risk disclosure*?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap positif *risk disclosure*?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap positif *risk disclosure*?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap positif *risk disclosure*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *risk disclosure*.
2. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap *risk disclosure*.
3. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *risk disclosure*.

4. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *risk disclosure*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini tentunya akan memberikan manfaat untuk berbagai pihak. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya bidang akuntansi. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan ide dan gagasan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *Risk Disclosure* maupun *Good Corporate Governance*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan informasi kepada para investor maupun kreditor untuk pengambilan keputusan investasi atau kredit kepada perusahaan yang memiliki laporan keuangan mengenai risiko. Dan juga melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan informasi dan pemahaman tentang *Risk Disclosure* maupun *Good Corporate Governance* untuk membantu memperbaiki praktek pengungkapan risiko dan tata kelola di perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dan antara bab 1 (satu) sampai dengan bab 5 (lima) yang saling berhubungan, dengan rician sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA menjelaskan landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain agency theory, manajemen risiko, pengungkapan risiko, dan faktor yang mempengaruhi risk disclosure.

BAB III METODE PENELITIAN membahas variabel penelitian dan definisi operasional penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS mencakup deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP terdiri atas simpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi (*agency theory*) dapat diartikan sebagai hubungan antara *agent* atau manajemen suatu usaha dan *principal* atau pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut teori ini, baik pemegang saham maupun pihak manajemen lebih cenderung bertindak atas kepentingan mereka sendiri.

Hubungan antara pemegang saham dan pihak manajemen sangat memungkinkan untuk terjadinya konflik yang biasa disebut dengan *agency conflict*. Teori agensi menyatakan bahwa antara pemegang saham dan pihak manajemen mempunyai kepentingan yang berbeda (Jensen dan Meckling, 1976). Salah satu perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen adalah para pemegang saham menginginkan untuk memaksimalkan keuntungannya, sedangkan keputusan yang dibuat oleh para manajer agar dapat memaksimalkan kepuasannya sendiri ternyata tidak menyejahterakan pemegang saham, maka terjadi *agency conflict*.

Beberapa *Agency Conflict* menurut Jensen dan Meckling (1976) adalah sebagai berikut:

1. *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja.
2. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan di mana pemegang saham tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh manajemen

didasarkan pada informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai kelalaian dalam tugas.

Agency Conflict lainnya adalah manajemen terlalu banyak mengetahui informasi sebenarnya mengenai masalah yang ditimbulkan perusahaan dibandingkan dengan para pemegang saham, sehingga menimbulkan asimetri informasi, di mana terjadi perbedaan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham sebagai pengguna informasi.

Pihak manajemen diasumsikan untuk berperilaku berdasarkan kepentingan mereka sendiri (Jensen and Meckling, 1976) dan pemegang saham mempunyai dua kesempatan utama untuk mengurangi biaya yang timbul dari masalah keagenan tersebut, di antaranya:

1. Mengawasi perilaku manajemen dengan mengaudit melalui audit internal atau mekanisme yang lain untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan kepentingan pemegang saham.
2. Menyediakan insentif pekerjaan yang menarik kepada manajemen dan mengatur ulang struktur *reward* yang dapat mendorong manajemen untuk berperilaku sesuai dengan kepentingan pemegang saham yang terbaik.

Kaitan teori ini dengan *risk disclosure* yaitu risiko berkaitan dengan ketidakpastian. Sedangkan pemegang saham juga cenderung ingin sesuatu yang pasti dari pihak manajemen, dan tidak ada keterbatasan maupun asimetri informasi yang diberikan. Sehingga pengungkapan risiko akan menjembatani

hubungan antara manajemen dan pemegang saham. Sedangkan *Good Corporate Governance* berperan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku oportunistik manajemen yang mungkin merugikan pemegang saham. Hal tersebut dikarenakan terdapat prinsip-prinsip pokok GCG yang perlu diperhatikan agar praktik penyelenggaraannya berjalan lancar seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip tersebut sudah cukup menggambarkan hubungan yang seharusnya terjadi antara manajemen dan pemegang saham. *Good Corporate Governance* diarahkan untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham. Sehingga inti dari kaitan teori agensi dengan variabel penelitian adalah menjembatani hubungan antara manajemen dan pemegang saham secara baik.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa harus adanya pengawasan agar manajemen dapat terkendali dalam menjalankan perusahaan, sehingga dapat mengurangi biaya yang timbul. Komisaris Independen dan Struktur kepemilikan seperti kepemilikan manajerial dan institusional merupakan salah satu cara untuk mengurangi biaya keagenan. Dikarenakan struktur kepemilikan bertindak sebagai pengawas untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan tahunan. Hal ini dapat membantu pekerjaan dewan direksi yang bertugas menjaga dan memajukan kepentingan para pemegang saham, seperti yang dilakukan oleh komisaris independen. Sedangkan ukuran Dewan Komisaris atau *Board Size* mengindikasikan akan lebih efektif dalam melakukan pengawasan jika ukurannya lebih besar. Menurut Dalton *et al.*, (1999) *board size* dengan ukuran yang optimum lebih efektif daripada *board size* dengan ukuran kecil.

2.1.2 Risiko

2.1.2.1 Pengertian Risiko

Risiko adalah suatu ketidakpastian di masa yang akan datang tentang kerugian (Hartono, 1995). Dengan kata lain, risiko merupakan suatu hal yang cenderung bersifat tidak pasti namun dapat memengaruhi masa depan. Risiko dapat terjadi karena kurangnya bahkan tidak tersedianya informasi tentang apa yang akan terjadi di masa depan.

Ketidakterediaan informasi merupakan salah satu akibat dari timbulnya suatu masalah. Hal ini menyebabkan gangguan pada proses operasional suatu perusahaan. Bila gangguan tersebut tidak dapat diatasi dengan baik, maka akan menimbulkan suatu kerugian di masa yang akan datang. Kerugian ini dapat dikatakan sebagai risiko yang timbul di perusahaan. Maka dari itu, perusahaan harus mengetahui secara mendetail tentang risiko-risiko yang dapat muncul agar mengurangi terjadinya kerugian.

Tidak dapat dihindari, setiap perusahaan pasti memiliki risiko masing-masing. Dari perusahaan yang kecil hingga perusahaan yang besar pun memiliki risiko, walaupun tingkat risiko yang dimiliki setiap perusahaan pasti berbeda-beda. Oleh karena itu agar dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko-risiko yang dapat muncul maka perlu dilakukannya manajemen risiko.

2.1.2.2 Manajemen Risiko

Dalam menghadapi risiko yang berpotensi muncul di masa depan, maka perusahaan perlu melakukan pengelolaan risiko. Salah satu pengelolaan risiko yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan cara manajemen risiko. Manajemen risiko digunakan perusahaan untuk mengelola risikonya atau menangkap kesempatan yang berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan (Amran *et al.*, 2009). Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut (Smith, 1990).

Tindakan manajemen risiko diambil perusahaan untuk menghadapi bermacam-macam risiko. Dalam melakukan tindakan terhadap risiko, manajemen risiko berperan untuk merespon risiko dengan cara mencegah dan memperbaiki. Tindakan mencegah digunakan untuk mengurangi, menghindari, atau melimpahkan risiko pada tahap awal proyek konstruksi. Menurut Darmawi (2005) manfaat manajemen risiko yang diberikan terhadap perusahaan dapat dibagi dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu:

1. Manajemen risiko memungkinkan untuk mencegah perusahaan dari kegagalan.
2. Manajemen risiko menunjang secara langsung peningkatan laba.
3. Manajemen risiko dapat memberikan laba secara tidak langsung.

4. Adanya ketenangan pikiran bagi manajer yang disebabkan oleh adanya perlindungan terhadap risiko murni, merupakan harta non-material bagi perusahaan itu.
5. Manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko murni, dan karena kreditur pelanggan dan pemasok lebih menyukai perusahaan yang dilindungi maka secara tidak langsung menolong meningkatkan *public image*.

Terdapat beberapa proses manajemen risiko secara umum dengan melakukan langkah-langkah berikut ini (ICAEW, 2002):

1. Pengidentifikasian risiko-risiko yang mungkin mengancam kegiatan operasi perusahaan, analisis dan penilaian profitabilitas serta dampak potensial risiko yang tidak terpisahkan dari strategi perusahaan.
2. Pemilihan teknik yang sesuai untuk menangani risiko berdasarkan pada probabilitas terjadinya risiko tersebut dan dampak yang dihasilkannya apakah dengan a) menghindari risiko (*risk avoidance*); b) mengurangi risiko (*risk reducing*); c) *risk retention* dengan membentuk cadangan; d) *risk deferral* atau; e) mentransfer risiko (*risk transfer*) pada pihak lain seperti perusahaan asuransi sesuai dengan strategi perusahaan.
3. Mengimplementasikan pengendalian untuk mengelola risiko yang tersisa;
4. Mengawasi keefektifitasan manajemen risiko;
5. Belajar dari pengalaman dan membuat perbaikan terhadap manajemen risiko

Proses manajemen risiko tiap perusahaan akan berbeda-beda. Hal ini tergantung dengan risiko yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan. Dalam konteks ini, yang terpenting adalah penerapannya sesuai dengan risiko yang

dihadapi sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Tugas mengelola risiko merupakan salah satu tugas manajer (*agent*). Tujuannya adalah agar para pemilik saham (*principal*) dapat meyakini bahwa perusahaan berjalan dengan baik.

2.1.3 Pengungkapan Risiko (*Risk Disclosure*)

Praktik pengungkapan risiko perusahaan merupakan bagian dari penerapan konsep pengungkapan (*disclosure*). Apabila dikaitkan dengan data, pengungkapan berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, pengungkapan mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil suatu aktivitas suatu unit usaha. Dalam interpretasi yang lebih luas, pengungkapan terkait dengan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan maupun informasi tambahan (*supplementary communications*) yang terdiri dari catatan kaki, informasi tentang kejadian setelah tanggal pelaporan, analisis manajemen tentang operasi perusahaan di masa yang akan datang, prakiraan keuangan dan operasi, dan informasi lainnya (Nuswandari, 2009).

Pengungkapan risiko dalam laporan keuangan terdiri dari pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang memiliki kandungan informasi berupa hal-hal yang wajib sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan dengan tambahan informasi di dalamnya selain informasi yang wajib dicantumkan sehingga dapat digunakan oleh manajemen untuk memberikan informasi kepada

pengguna laporan tahunan dalam mengambil keputusan. Pengungkapan sukarela dapat mengubah harapan pemangku kepentingan tentang nilai perusahaan (Einhorn, 2007).

Terdapat beberapa peraturan tentang pengungkapan telah diterapkan di Indonesia, salah satunya adalah ketentuan tentang pengungkapan risiko. Pengungkapan risiko diatur dalam BAPEPAM dan LK Nomor:Kep-134/BL/2006 tentang : kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten dan perusahaan publik. Sedangkan Ketentuan mengenai pengungkapan informasi diatur dalam PSAK No.60 (Revisi 2010) tentang Instrumen keuangan: Penyajian dan Pengungkapan. Standar ini menggabungkan dan memperluas sejumlah persyaratan pengungkapan yang telah ada sebelumnya dan menambahkan beberapa pengungkapan baru.

PSAK No. 60 berisi pengungkapan-pengungkapan baru atas risiko-risiko dan manajemen risiko dan mensyaratkan entitas pelaporan untuk melaporkan sensitivitas instrumen keuangannya terhadap pergerakan risiko-risiko tersebut. Beberapa peraturan baru yang penting antara lain :

1. Pengungkapan kualitatif dan kuantitatif atas dampak dari risiko-risiko, antara lain risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas;
2. Penambahan pengungkapan untuk item-item yang mempengaruhi jumlah laba komprehensif, dimana keuntungan dan kerugian dipisahkan berdasarkan kategori instrumen keuangan; dan

3. Pengungkapan nilai wajar untuk setiap kelas aset dan liabilitas keuangan, serta pengungkapan hirarki nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diukur dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan.

2.1.4 Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan bagian dari *corporate governance*. Jensen (1993) dan Lipton dan Lorsch (1992) dalam Beiner *et al.*, (2003) merupakan yang pertama menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris merupakan bagian dari mekanisme *corporate governance*. Hal ini diperkuat oleh pendapat Allen dan Gale (2000) dalam Beiner *et al.*, (2003) yang menegaskan bahwa dewan komisaris merupakan mekanisme *governance* yang penting.

Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak (Fama dan Jensen, 1983). Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance* (KNKG, 2006).

Ukuran dewan komisaris yang dimaksud adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Menurut Dalton *et al.*, (1999) dewan komisaris dengan ukuran yang optimum lebih semakin mudah untuk mengendalikan Chief Executives Officer (CEO) dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen daripada dewan komisaris dengan ukuran kecil.

Fungsi pelayanan dewan (komisaris) dapat memberikan konsultasi dan nasehat manajemen (dan direksi). Penelitian Lorsch dan MacIver (1989) menemukan bahwa peranan pemberian saran (*advisory*) mendominasi aktivitas anggota dewan. Dengan menekankan pada fungsi ini, Dalton *et al.* (1999) menyatakan bahwa peranan keahlian atau konseling yang diberikan oleh anggota dewan tersebut merupakan suatu jasa yang berkualitas bagi manajemen dan perusahaan yang tidak dapat diberikan oleh pasar. Anggota dewan komisaris yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu juga dapat memberikan nasehat yang bernilai dalam penyusunan strategi dan penyelenggaraan perusahaan (Young *et al.*, 2001).

Fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan (komisaris) diambil dari teori agensi. Dari persepektif teori agensi, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk mengontrol perilaku oportunistik manajemen sehingga dapat membantu menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer (Young *et al.*, 2001). Dari kedua fungsi dewan tersebut, terlihat bahwa jumlah komisaris berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.1.5 Komisaris Independen

Sesuai yang tertera dalam KNKG (2006) menyatakan bahwa dewan komisaris terdiri dari 2 macam, yaitu komisaris yang terafiliasi dan komisaris independen. Komisaris yang terafiliasi merupakan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, serta dengan perusahaan itu sendiri, sedangkan komisaris independen

adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata mata demi kepentingan perseroan.

Salah satu anggota dewan komisaris adalah para komisaris independen. Komisaris independen memiliki peran sebagai pengendali apabila terjadi konflik agensi yang terjadi antara pihak manajemen dan para pemegang saham. Karena komisaris independen juga bertugas untuk mengawasi kegiatan operasional perusahaan, perilaku manajer, dan tindakan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan apabila terjadi penyimpangan yang telah disetujui antara pihak manajemen dan para pemegang saham. Perusahaan dengan tingkat proporsi dewan komisaris independen yang tinggi biasanya akan mendapat tuntutan untuk memberikan informasi lebih banyak guna sebagai penyeimbangan pada tingkat risiko. Seperti yang dikatakan oleh Baek *et al.*, (2009) bahwa perusahaan dengan persentase komisaris independen yang semakin tinggi maka lebih mungkin untuk mengungkapkan secara luas proses manajemen informasi.

2.1.6 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan saham manajerial merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen (Boediono, 2005). Peran manajemen dalam hal ini tidak hanya dalam mengelola perusahaan dengan baik tetapi juga mengontrol serta mengawasi jalannya perusahaan. Sehingga semakin besar kepemilikan oleh

manajemen maka akan cenderung lebih memonitoring kegiatan perusahaan. Kepemilikan saham manajerial juga dapat mengurangi konflik agensi, karena peran ganda manajemen dalam mengelola serta mengawasi jalannya perusahaan, mengakibatkan para manajemen akan lebih selektif dalam mengambil keputusan bagi perusahaan. Manfaat langsung dari pengambilan keputusan ini adalah apabila keputusan yang diambil tepat maka perusahaan akan berjalan dengan baik, namun bila mengambil keputusan yang salah akan mengalami kerugian.

2.1.7 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga baik domestik maupun asing (pemerintah, perusahaan asuransi, bank, perusahaan institusi lainnya, warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia). Kepemilikan institusional di sini bertindak sebagai pihak investor baik domestik maupun asing yang mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya perusahaan yang dilakukan oleh manajemen. Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor non manajerial dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku oportunistik atau mementingkan diri sendiri (Cornet *et al.*, 2006). Perusahaan akan berjalan dengan baik karena kepemilikan institusional akan selalu memonitoring segala aktivitas perusahaan, sehingga manajemen akan memaksimalkan kinerjanya, hal ini juga dapat mengurangi biaya agensi. Sedangkan untuk kepemilikan institusional asing juga dapat

mendatangkan manfaat pada perusahaan. Seperti contohnya semakin banyak pihak asing yang memiliki saham di perusahaan domestik maka perusahaan mungkin dapat berkembang menjadi perusahaan multinasional.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan variabel *risk disclosure* maupun *Good Corporate Governance*. Menurut Linsley dan Shirves (2006), *risk disclosure* dapat juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan berhubungan secara signifikan dengan luas pengungkapan risiko. Menurut Abraham dan Cox (2007), *risk disclosure* tidak dipengaruhi oleh jenis industri, profitabilitas, dan kepemilikan saham publik. Namun kepemilikan institusi yang bersifat jangka pendek, ukuran dewan komisaris, dan jumlah komisaris independen berpengaruh terhadap *risk disclosure*. Penelitian oleh Suhardjanto dan Dewi (2011) menyebutkan ukuran dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap *risk disclosure*. Namun untuk komposisi komisaris independen, komposisi komite audit independen, dan jumlah rapat komite audit independen tidak berpengaruh terhadap *risk disclosure*. Penelitian tersebut menyebutkan rendahnya tingkat pengungkapan risiko menunjukkan kurangnya penerapan tata kelola perusahaan secara baik. Probohudono *et al.*, (2013) menyebutkan negara, komisaris independen, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *risk disclosure*. Namun untuk kepemilikan manajerial tidak memengaruhi *risk disclosure*. Penelitian yang

lebih baru lagi menurut Indriyani (2014) menyebutkan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusi domestik maupun asing, kepemilikan publik tidak memiliki pengaruh terhadap *risk disclosure*. Sedangkan komisaris independen dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *risk disclosure*.

Berikut merupakan rangkuman penelitian di atas yang telah disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Linsley dan Shrives (2006)	<i>Risk Reporting: A Study of Risk Disclosure in The Annual Reports of UK Companies</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran perusahaan berhubungan secara signifikan dengan luas pengungkapan risiko. • Hanya <i>BiE Index</i> dan the <i>Eco Value '21 TM Rating Model</i> yang mewakili tingkat risiko perusahaan yang berhubungan secara signifikan dengan luas pengungkapan risiko.
2.	Abraham dan Cox (2007)	<i>Analysing The Determinants of Narrative Risk Information in UK FTSE 100 Annual Reports</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis industri, profitabilitas dan kepemilikan saham publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko. Namun kepemilikan yang dimiliki oleh <i>shortterm institutions</i> berhubungan positif dengan pengungkapan risiko. • Ukuran dewan komisaris dan jumlah komisaris independen berhubungan positif dengan pengungkapan risiko.
3.	Djoko	Pengungkapan Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Tata kelola perusahaan

	Suhardjanto dan Aryane Dewi (2011)	Finansial dan Tata Kelola Perusahaan: Studi Empiris Perbankan Indonesia	<p>memengaruhi tingkat pengungkapan risiko finansial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel yang memengaruhi tersebut adalah ukuran dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris • Komposisi komisaris independen, komposisi komite audit independen, dan jumlah rapat audit komite independen tidak memengaruhi tingkat pengungkapan risiko finansial • Rendahnya tingkat pengungkapan risiko finansial menunjukkan kurangnya penerapan tata kelola perusahaan.
4.	Agung Nur Probohudono, Greg Tower, dan Rusmin (2013)	<i>Risk Disclosure During The Global Financial Crisis</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Negara berhubungan dengan pengungkapan risiko, baik ukuran perusahaan maupun <i>board independence</i> berpengaruh positif pada pengungkapan risiko. • Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara konsisten.
5.	Fauziah Lina Indriyani (2014)	Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan, Komisaris Independen, dan Ukuran Perusahaan terhadap Risk Disclosure (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013)	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan risiko perusahaan. • Kepemilikan institusi domestik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan risiko perusahaan. • Kepemilikan institusi asing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

			<p>luas pengungkapan risiko perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan publik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan risiko perusahaan. • Proporsi komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan risiko perusahaan dengan arah positif. • Ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan risiko perusahaan dengan arah positif.
--	--	--	--

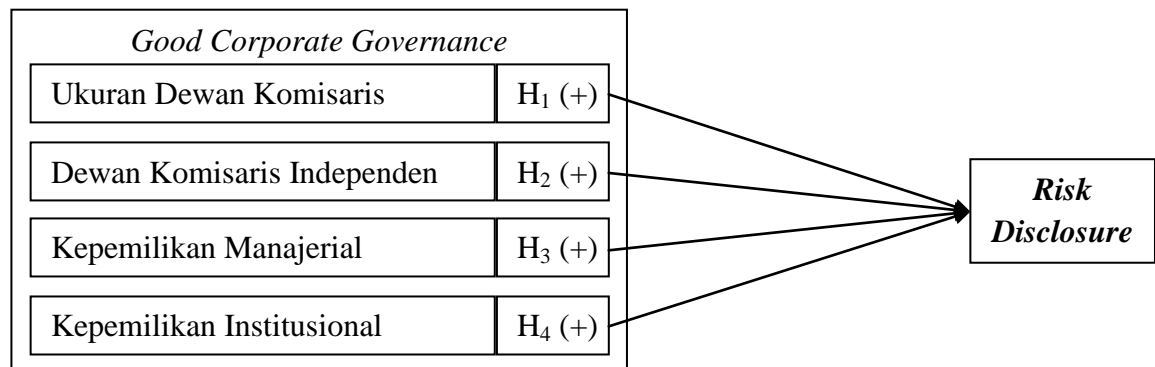
2.3 Kerangka Pemikiran

Pengungkapan risiko merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh perusahaan dan juga merupakan faktor untuk menarik para investor. Agar pengungkapan risiko lebih efektif dan berkualitas maka diperlukannya pengawasan. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh para pemilik saham dan komisaris independen bertujuan untuk mengurangi biaya agensi. Sedangkan ukuran dewan komisaris yang lebih besar menimbulkan pengawasan yang lebih banyak, sehingga cenderung untuk mendorong para manajer untuk menjalankan perusahaan dengan baik. Berdasarkan tinjauan pustaka, maka peneliti mengindikasikan teori agensi terdiri dari ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional

sebagai variabel independen, dan *risk disclosure* sebagai variabel dependen.

Model kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Risk Disclosure*

Ukuran Dewan Komisaris atau *Board Size* mengindikasikan akan lebih efektif dalam melakukan pengawasan jika ukurannya lebih besar. Sehingga manajemen dan pemegang saham dapat saling mengawasi dan terhindar munculnya asimetri informasi. Pada beberapa penelitian sebelumnya memberikan hasil yang signifikan dari ukuran dewan komisaris pada pengungkapan risiko. Menurut Dalton *et al.*, (1999) dewan komisaris dengan ukuran yang optimum lebih semakin mudah untuk mengendalikan Chief Executives Officer (CEO) dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen daripada dewan komisaris dengan ukuran kecil. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good*

Corporate Governance (KNKG, 2006). Pada penelitian sebelumnya terdapat hubungan positif antara ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan risiko.

Berdasarkan teori agensi, ukuran dewan komisaris memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pelayanan dan fungsi kontrol terhadap manajemen. Dewan komisaris merupakan bagian dari *corporate governance*. Beberapa pihak juga menekankan bahwa dewan komisaris merupakan mekanisme *governance* yang penting. Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Fungsi pelayanan dewan (komisaris) dapat memberikan konsultasi dan nasehat manajemen (dan direksi). Anggota dewan komisaris yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu juga dapat memberikan nasehat yang bernilai dalam penyusunan strategi dan penyelenggaraan perusahaan. Sedangkan fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan (komisaris) diambil dari teori agensi. Dari persepektif teori agensi, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk mengontrol perilaku oportunistik manajemen sehingga dapat membantu menyalurkan kepentingan pemegang saham dan manajer. Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Risk Disclosure*.

2.4.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Risk Disclosure*

Komisaris Independen merupakan salah satu cara untuk mengurangi biaya keagenan atau *agency cost*. Komisaris independen membantu pekerjaan dewan direksi yang bertugas menjaga dan memajukan kepentingan para pemegang

saham. Pemegang saham cenderung menuntut kepada komisaris independen untuk melakukan pengungkapan yang dilakukan secara luas. Mengawasi dan mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan sehingga dapat mengurangi biaya agensi yang ditimbulkan merupakan salah satu tugas dari dewan komisaris independen. Peran yang dimiliki oleh komisaris independen ini akan memengaruhi pengungkapan. Perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang lebih banyak biasanya mengungkapkan informasinya secara lebih luas, dengan begitu hal ini juga dapat mengurangi biaya agensi. Pada penelitian Baek *et al.*, (2009) dalam Probohudono *et al.*, (2013) menyimpulkan bahwa perusahaan dengan persentase komisaris independen yang semakin tinggi maka lebih mungkin untuk mengungkapkan secara luas begitu pula manajemen informasinya. Pengaruh antara komisaris independen pada pengungkapan memperoleh hasil yang signifikan.

Hasil dari kebanyakan penelitian terdahulu juga mencatat hubungan positif antara komisaris independen dan tingkat pengungkapan (Baek *et al.*, 2009;. Chen dan Jaggi, 2000; Cheng dan Courtenay, 2006; Beretta dan Bozzoland, 2004; Garcia-Meca dan Sanches-Ballesta, 2010 dalam Prubohudono *et al.*, 2013). Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap *Risk Disclosure*.

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Risk Disclosure*

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu cara untuk mengurangi biaya keagenan. Dikarenakan struktur kepemilikan bertindak sebagai pengawas untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan tahunan. Hal ini dapat membantu pekerjaan dewan direksi yang bertugas menjaga dan memajukan kepentingan para pemegang saham. Penelitian sebelumnya menghasilkan hasil pengaruh yang signifikan dari kepemilikan manajerial pada pengungkapan risiko. Penelitian yang dilakukan oleh Gerb (2000) dalam Probohudono *et al.*, (2013) menguji pengaruh kepemilikan manajerial pada pengungkapan risiko sebuah perusahaan dan menemukan perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang lebih rendah memungkinkan pengungkapan risiko yang lebih informatif daripada perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang lebih tinggi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Eng dan Mak (2003) dalam Probohudono *et al.*, (2013) meneliti bahwa adanya hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dan peningkatan pengungkapan.

Berdasarkan teori agensi yang berkaitan dengan kepemilikan manajerial, dalam hal ini manajer memiliki dua peran yaitu sebagai pengelola perusahaan dan sebagai pemegang saham. Dalam suatu struktur kepemilikan tertentu memberikan insentif yang rendah bagi manajer yang melakukan pengungkapan risiko secara sukarela. Kepemilikan manajerial dalam hal ini masih terdapatnya pemisahan kepentingan antara manajer berperan sebagai pemilik perusahaan juga sebagai pengelola perusahaan. Dengan demikian, semakin tinggi kepemilikan manajerial maka memungkinkan juga semakin menurunnya pengungkapan risiko. Konsisten

dengan hasil studi masa lalu yang mencatat hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dan tingkat pengungkapan (Gerb, 2000; Eng dan Mak, 2003 dalam Probohudono *et al.*, 2013) sedangkan dalam penelitian Probohudono *et al.*, (2013) meneliti bahwa secara konsisten tidak adanya pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap risk disclosure. Maka dapat disimpulkan bahwa struktur kepemilikan manajerial sebagai faktor potensial menjelaskan hubungan yang negatif dengan pengungkapan risiko. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diperoleh hipotesis berikut:

H₃ : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *Risk Disclosure*.

2.4.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Risk Disclosure*

Sama seperti kepemilikan manajerial merupakan salah satu cara untuk mengurangi biaya keagenan. Dikarenakan struktur kepemilikan bertindak sebagai pengawas untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan tahunan. Hal ini dapat membantu pekerjaan dewan direksi yang bertugas menjaga dan memajukan kepentingan para pemegang saham. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga baik domestik maupun asing (pemerintah, perusahaan asuransi, bank, perusahaan institusi lainnya, warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia). Kepemilikan institusional di sini bertindak sebagai pihak investor baik domestik maupun asing yang mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya perusahaan yang dilakukan oleh manajemen. Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor non

manajerial dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku oportunistik atau mementingkan diri sendiri (Cornet *et al.*, 2006). Perusahaan akan berjalan dengan baik karena kepemilikan institusional akan selalu memonitoring segala aktivitas perusahaan, sehingga manajemen akan memaksimalkan kinerjanya, hal ini juga dapat mengurangi biaya agensi. Sedangkan untuk kepemilikan institusional asing juga dapat mendatangkan manfaat pada perusahaan. Seperti contohnya semakin banyak pihak asing yang memiliki saham di perusahaan domestik maka perusahaan mungkin dapat berkembang menjadi perusahaan multinasional.

Seperti penelitian sebelumnya ditemukan hubungan positif antara kepemilikan institusional dengan pengungkapan risiko. Semakin besar persentase kepemilikan saham oleh institusi maka semakin efektif pula usaha monitoring terhadap manajemen, yang disebabkan oleh dapat terkendalinya perilaku menyimpang yang dilakukan manajemen, sehingga dapat mengurangi *agency cost*. Oleh karena itu memungkinkan manajer secara sukarela mengungkapkan informasi untuk memenuhi harapan para pemegang saham. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diperoleh hipotesis berikut:

H₄ : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *Risk Disclosure*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Terikat/ Dependen

3.1.1.1 Pengungkapan Risiko (*Risk Disclosure*)

Variabel terikat atau variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas/ variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan risiko (*risk disclosure*). Pengungkapan risiko merupakan pemberian informasi kepada pihak yang memerlukan mengenai potensi kesempatan atau hambatan maupun eksposur pada strategi, tindakan dan kinerja perusahaan yang telah atau akan berpengaruh pada perusahaan (Linsley dan Shrives, 2006). Laporan mengenai pengungkapan risiko biasanya disajikan dalam laporan tahunan perusahaan.

Mengacu pada penelitian Probohudono *et al.* (2013) pengukuran variabel dependen dalam penelitian ini adalah menggunakan *Risk Disclosure Index* (RDI) dengan mendeteksi jumlah RDI yang tertera pada seluruh pengungkapan risiko yang diungkapkan oleh perusahaan dan disajikan dalam laporan tahunan perusahaan. Penelitian ini mengadopsi konstruksi penelitian *Risk Disclosure Index* (RDI) untuk membuat indeks yang mengukur tingkat pengungkapan risiko yang tercantum pada perusahaan. Pada tahap awal, tinjauan luas penelitian sebelumnya dilakukan untuk memeriksa kesamaan di penelitian terdahulu dan identifikasi item yang jelas terkait dengan pengungkapan risiko. Indeks pengungkapan meliputi komponen yang relevan dari penelitian Solomon *et al.*, (2000), Linsley dan

Shrives (2006) yang menggunakan *The Turnbull Report*; Suhardjanto (2008) yang menerapkan *Global Report Initiative* (GRI); Akhigbe dan Martin (2008) yang menganjurkan Sarbanes-Oxley Act; Instrumen Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure Instrument/ VDIS*) dari Ho (2009); dan checklist pengungkapan sukarela dari Gray *et al.*, (1995) sesuai dalam Probohudono *et al.*, (2013). Elemen-elemen kunci dari penelitian di atas digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh daftar pengungkapan patokan (Probohudono *et al.*, 2013). Indeks ini mengasumsikan bahwa setiap item pengungkapan sama penting (Gray *et al.*, 1995 dalam Probohudono *et al.*, 2013). Secara keseluruhan, pendekatan ini pengukuran sederhana dianggap paling tepat karena kurang subjektif dan kurang menghakimi (Gray *et al.*, 1995 dalam Probohudono *et al.*, 2013).

Namun pada penelitian ini mengacu pada penelitian Suhardjanto dan Dewi (2011), RDI yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 46 item. Hal tersebut terlampir pada surat edaran Bank Indonesia tahun 2012. Setelah RDI dihitung, lembar penilaian dikembangkan untuk menilai sejauh mana pengungkapan risiko sukarela. Konsisten dengan penelitian sebelumnya, setiap item diberikan skor satu jika diungkapkan dan nol jika tidak diungkapkan. Item-item RDI dalam penelitian ini terdapat pada lampiran. Formulasinya sebagai berikut:

$$RDI = \frac{\text{Jumlah skor RDI yang diungkapkan}}{\text{Jumlah keseluruhan skor RDI}} \times 100\%$$

RDI = Risk Disclosure Index

3.1.2 Variabel Bebas/ Independen

3.1.2.1 Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan bagian dari *corporate governance*. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance*. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto dan Dewi (2011), variabel ukuran dewan komisaris dihitung dengan cara:

$$BOARDSIZE = \sum \text{Komisaris Internal} + \sum \text{Komisaris Eksternal}$$

$$BOARDSIZE = \text{Ukuran Dewan Komisaris}$$

3.1.2.2 Proporsi Komisaris Independen

Proporsi jumlah komisaris independen dapat menggambarkan tingkat independensi dan objektivitas dewan dalam pengambilan keputusan (Spira dan Bender, 2004). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Probohudono *et al.*, (2013), variabel ini menggunakan persentase proporsi komisaris independen, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$BOARDINDEP = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

$$BOARDINDEP = \text{Komisaris Independen}$$

3.1.2.3 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen dalam satu perusahaan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Probohudono *et al.*, (2013), variabel kepemilikan manajemen ini menggunakan persentase kepemilikan manajerial, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$MGROWN = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajerial}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

$$MGROWN = \text{Kepemilikan Manajerial}$$

3.1.2.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga baik domestik maupun asing (pemerintah, perusahaan asuransi, bank, perusahaan institusi lainnya, warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Probohudono *et al.*, (2013), variabel kepemilikan institusional ini menggunakan persentase kepemilikan manajerial, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$INSTOWN = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

$$INSTOWN = \text{Kepemilikan Institusional}$$

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang pada tahun 2011 s.d. 2013 terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Sampel yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012 s.d. 2014 yang juga memenuhi kriteria penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* bertujuan agar informasi yang diperoleh dengan menggunakan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian dapat diolah secara tepat sasaran. Kriteria sampel yang digunakan adalah :

1. Sampel yang dipilih adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012 s.d. 2014.
2. Sampel yang dipilih adalah perusahaan perbankan yang mempublikasikan laporan tahunan pada tahun 2012 s.d. 2014 secara lengkap.
2. Sampel yang dipilih adalah perusahaan perbankan yang memiliki data-data terkait dengan variabel penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang diambil dari laporan tahunan perusahaan perbankan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah pengungkapan risiko, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Laporan tahunan diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id dan juga dari

pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdapat di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data dokumenter seperti yang ada pada laporan tahunan. Proses penggunaan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian. Pada penelitian ini, dilakukannya penelusuran dan pencatatan informasi pengungkapan risiko pada laporan tahunan.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data berguna untuk memperkirakan besarnya pengaruh antar variabel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi linier berganda.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2011). Tujuan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui gambaran umum mengenai variabel-variabel yang diteliti.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebagai syarat agar dapat melakukan pengujian regresi linier berganda. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi, antara variabel dependen dengan variabel independen apakah mempunyai hubungan distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2009). Pengujian normalitas data dilakukan terhadap data residual model regresi. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Selain itu pengujian juga dilakukan secara multivariat dengan menggunakan PP Plot. Analisis statistik dilakukan dengan melihat hasil *Kolmogorov-Smirnov*, jika di atas tingkat signifikansi 0,05 maka menunjukkan pola distribusi normal (Ghozali, 2011).

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah adanya korelasi antar variabel independen pada model regresi atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2011). Dalam pengujian ini dapat diketahui dengan melihat koefisien korelasi parsial antara variabel bebas. Pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance*

maupun VIF (*Variance Inflation Factor*). Model regresi yang bebas multikolinearitas mempunyai nilai VIF < 10 dan mempunyai angka tolerance $> 0,1$ atau mendekati 1 (Ghozali, 2009).

3.5.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu ke pengamatan lain, maka disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan *Scatterplot*. Apabila pola yang dibentuk oleh *Scatterplot* tidak teratur maka model regresi tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan merespon variabel independen dengan nilai absolut *unstandardized* residual regresi sebagai variabel dependen. Apabila hasil uji signifikan yaitu lebih besar 0,05, maka tidak terdapat heterokedastisitas, sedangkan apabila signifikansi dibawah 0,05 maka terdapat gejala heteroskedastisitas.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang

waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2011).

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (Ghozali, 2009). Pengujian autokorelasi dengan menggunakan uji *Durbin-Watson*, yaitu dengan menghitung nilai d statistik dengan tingkat signifikan 0,05. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Uji Autokorelasi *Durbin Watson*

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < dw < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No decision	$4-du \leq d \leq 4-dl$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak Tolak	$du < d < 4-du$

Keterangan : dl = batas bawah d dan du = batas atas d

Model regresi bebas dengan autokorelasi apabila nilai koefisien *Durbin Watson* terletak antara du dan $4-du$.

3.5.3 Model Regresi

Analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2009). Analisis data dimulai dengan menghitung besarnya masing-masing variabel terikat dan bebas dan dilanjutkan dengan meregresikan variabel bebas dengan variabel terikat dengan model regresi linier berganda.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dengan menentukan nilai variabel dependen yaitu *risk disclose* dengan pengukuran RDI dan untuk menaksir nilai-nilai yang berhubungan dengan variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional dengan menggunakan rumus statistik sebagai berikut:

$$RDI = \alpha + \beta_1 BOARDSIZE + \beta_2 BOARDINDEP + \beta_3 INSTOWN + \beta_4 MGROWN + e$$

Keterangan:

RDI : Risk Disclosure Index

α : Konstanta

$\beta, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien Regresi

BOARDSIZE : Ukuran Dewan Komisaris

BOARDINDEP : Proporsi Komisaris Independen

MGROWN : Kepemilikan Manajerial

INSTOWN : Kepemilikan Institusional

e : Variabel Pengganggu

3.5.4 Uji Hipotesis

3.5.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk menguji model penelitian ini adalah dengan menghitung koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol

dan satu (Ghozali, 2009). Jika variabel uji R^2 memiliki nilai 0 atau mendekati 0, berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen mengalami keterbatasan, tetapi jika variabel uji R^2 memiliki nilai 1 atau mendekati satu maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Dalam pengujian ini akan diketahui seberapa besar variabel dependen dapat mampu dijelaskan oleh variabel independennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebabsebab lain di luar penelitian.

3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat (Ghozali, 2011). Dalam pengujian ini kesimpulan dapat diperoleh dengan menilai probabilitas signifikan kurang 5%, maka variabel independen bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variasi variabel terikat (Ghozali, 2011). Pengujian ini dapat diperoleh suatu kesimpulan dengan melihat signifikasinya yang terbentuk di bawah 5%, maka variabel independen bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.